

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kevin Andika Putra¹, Zahmil Husein², Siska Aulia Putri³, Wahjoe Pangestoeti⁴

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Kepulauan Riau^{1,2,3,4}

Email: saputri@student.umrah.ac.id¹, kaputra@student.umrah.ac.id², zhusein@student.umrah.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>The increase in Fuel Oil (BBM) prices in the Riau Archipelago Province (Kepri) has had a significant impact on inflation and the purchasing power of the community. This study aims to analyze the impact using a qualitative approach by utilizing data from social assistance programs, transportation subsidies, market operations, and BBM distribution supervision. The findings indicate that the increase in BBM prices contributes to high inflation, leading to higher prices of essential goods, transportation, and energy. The community, especially low- and middle-income groups, experiences a significant decline in purchasing power, forcing them to reduce spending on non-essential goods. The government has taken various measures, such as providing subsidies, holding affordable markets, and overseeing distribution to mitigate these impacts. However, these policies need to be strengthened with a more integrated approach to address the long-term effects of BBM price fluctuations.</i></p>
Nomor : 6	
Bulan : Juni	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keywords: *BBM Price Increase, Inflation, Purchasing Power, Kepri*

Abstrak

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan dampak signifikan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan data dari program bantuan sosial, subsidi transportasi, operasi pasar, dan pengawasan distribusi BBM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM berkontribusi pada inflasi yang tinggi, yang mengarah pada peningkatan harga barang kebutuhan pokok, transportasi, dan energi. Masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah, mengalami penurunan daya beli yang signifikan, yang memaksa mereka untuk mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan subsidi, pasar murah, dan pengawasan distribusi untuk mengurangi dampak tersebut. Namun, kebijakan ini perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih terintegrasi agar dapat mengatasi dampak jangka panjang dari fluktuasi harga BBM.

Kata Kunci: *Kenaikan Harga BBM, Inflasi, Daya Beli, Kepri*

A. PENDAHULUAN

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu fenomena yang sering kali terjadi sebagai respons terhadap perubahan harga minyak dunia. Sebagai komoditas utama yang digunakan dalam berbagai sektor ekonomi, baik untuk transportasi, industri, maupun rumah tangga, perubahan harga BBM memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik. Di Indonesia, kenaikan harga BBM sering kali dipicu oleh fluktuasi harga minyak mentah global yang tidak terhindarkan. Selain itu, kebijakan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah juga turut mempengaruhi dinamika harga BBM di pasar domestik. Kenaikan harga BBM, meskipun kadang dianggap sebagai langkah rasional dalam pengelolaan ekonomi, sering kali menimbulkan dampak negatif, terutama bagi daya beli masyarakat.

Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tergantung pada sektor transportasi dan industri berbasis sumber daya alam, kenaikan harga BBM dirasakan cukup besar pengaruhnya. Mengingat Kepri merupakan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut dan udara, peningkatan harga BBM akan langsung mempengaruhi biaya distribusi barang dan jasa. Hal ini pada gilirannya dapat berkontribusi pada inflasi, yang memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji adalah: Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan daya beli masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau?

Penelitian ini berfokus pada pengaruh langsung dan tidak langsung dari kenaikan harga BBM terhadap peningkatan biaya hidup masyarakat, terutama dalam hal inflasi dan penurunan daya beli mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat faktor-faktor lain yang turut berperan dalam membentuk dampak tersebut, seperti kebijakan pemerintah dan respons masyarakat terhadap perubahan harga BBM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan daya beli masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kenaikan harga BBM, inflasi, dan daya beli masyarakat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang turut berperan dalam memperburuk atau meringankan dampak tersebut.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi dampak negatif kenaikan harga

BBM, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi yang terdampak secara langsung. Dengan adanya pemahaman yang lebih jelas tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, diharapkan upaya pengendalian ekonomi dapat dilakukan dengan lebih terarah dan tepat sasaran.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan daya beli masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat serta pihak-pihak terkait mengenai perubahan harga BBM dan dampaknya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah responden yang terdiri dari masyarakat yang tinggal di Kepri, pelaku usaha, serta pejabat pemerintah daerah. Selain itu, observasi langsung terhadap perubahan harga barang dan pola konsumsi masyarakat juga dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana pola-pola dan tema-tema utama akan diidentifikasi dan dijelaskan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi.

Selain wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji laporan pemerintah, data inflasi, dan laporan sosial ekonomi dari badan-badan terkait untuk memahami konteks kebijakan harga BBM serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai pengaruh kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan daya beli masyarakat di Kepri, serta memberikan informasi yang relevan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi isu ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Kenaikan harga ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi, atau ketika biaya produksi, seperti harga bahan bakar, tenaga kerja, dan bahan baku lainnya, meningkat. Inflasi biasanya diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK) yang mencatat

perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Sebagai salah satu indikator penting dalam perekonomian, inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, kestabilan ekonomi, dan keputusan investasi, serta berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penyebab inflasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu inflasi demand-pull, cost-push, dan built-in. Inflasi demand-pull terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada kapasitas produksi, misalnya karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, inflasi cost-push terjadi ketika biaya produksi meningkat, seperti ketika harga bahan bakar atau upah tenaga kerja naik, yang menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang dan jasa. Built-in inflation terjadi ketika pekerja dan perusahaan secara terus-menerus menaikkan upah dan harga untuk mengimbangi biaya hidup yang meningkat, menciptakan lingkaran kenaikan harga yang terus-menerus.

Dampak inflasi terhadap perekonomian sangat bergantung pada tingkat dan kestabilannya. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap atau rendah. Hal ini dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan mengurangi kualitas hidup. Di sisi lain, inflasi yang moderat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena mendorong konsumen untuk segera membeli barang dan jasa, serta meningkatkan investasi. Namun, jika inflasi tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, mengurangi daya tarik investasi asing, serta merusak kestabilan harga di pasar domestik. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas kebijakan ekonomi negara untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat merujuk pada kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan atau inginkan, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Daya beli ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima oleh masyarakat serta harga barang dan jasa yang ada di pasar. Masyarakat dengan daya beli tinggi memiliki kapasitas untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, sementara masyarakat dengan daya beli rendah sering kali terhambat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat terbatasnya pendapatan atau mahalannya harga barang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat sangat beragam, di antaranya adalah tingkat pendapatan, inflasi, harga barang dan jasa, serta kebijakan pemerintah. Pendapatan adalah faktor utama, karena semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula

kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa. Inflasi juga memainkan peran penting, karena kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi nilai riil dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga daya beli cenderung menurun. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti pemberian subsidi, pengenaan pajak, atau kebijakan moneter juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Kebijakan yang dapat menstabilkan harga atau meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti melalui program bantuan sosial, berpotensi untuk meningkatkan daya beli.

Indikator pengukuran daya beli umumnya melibatkan indeks harga konsumen (IHK) yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga. Selain itu, pendapatan per kapita juga sering digunakan sebagai indikator daya beli, di mana semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai barang dan jasa. Tingkat pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi indikator penting, karena tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat secara signifikan, sementara ketersediaan pekerjaan yang banyak dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli.

Daya beli masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan sosial dan perekonomian suatu negara. Ketika daya beli masyarakat menurun, dampaknya bisa sangat luas, termasuk menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan cara mengukurnya sangat penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.

Pengaruh Kenaikan BBM terhadap Inflasi dan Daya Beli

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sering kali dipandang sebagai salah satu pemicu utama inflasi, terutama di negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada gilirannya meningkatkan harga barang dan jasa di pasar. Menurut beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Tiro et al. (2017), inflasi akibat kenaikan harga BBM terutama terlihat pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada transportasi, seperti pangan, energi, dan barang-barang konsumsi lainnya. Kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan biaya produksi, yang sering kali diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

Selain dampaknya terhadap inflasi, kenaikan harga BBM juga berpengaruh signifikan

terhadap daya beli masyarakat. Penelitian oleh Pratama (2019) menunjukkan bahwa ketika harga BBM naik, daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Masyarakat yang memiliki pendapatan tetap atau terbatas sering kali terpaksa mengurangi konsumsi barang dan jasa non-pokok, seperti hiburan dan rekreasi, untuk menutupi kebutuhan dasar mereka yang semakin mahal. Hal ini berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat, yang beralih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak mendesak.

Penelitian lainnya oleh Yusuf dan Setiawan (2020) menemukan bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli juga dipengaruhi oleh kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang diterapkan pemerintah. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemberian subsidi BBM sering kali bertujuan untuk meringankan dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Namun, meskipun subsidi dapat mengurangi dampak langsung kenaikan harga BBM, kebijakan ini tidak selalu cukup untuk mengatasi lonjakan inflasi yang lebih besar. Oleh karena itu, beberapa studi menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi dan pengelolaan kebijakan energi yang lebih efisien untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menyoroti peran inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM dalam memengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Wijaya dan Purnama (2021) mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap inflasi adalah mereka yang memiliki pendapatan tetap atau rendah, sehingga kenaikan harga BBM dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Kenaikan harga BBM menyebabkan tingginya biaya hidup, sementara pendapatan mereka tidak mengalami peningkatan yang setara, yang semakin memperburuk daya beli mereka.

Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya mempengaruhi inflasi tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak harga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang dapat mengatasi kedua masalah tersebut secara bersamaan, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika harga BBM dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian pasar energi global.

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Inflasi di Kepri

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia, khususnya di

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), membawa dampak yang signifikan terhadap tingkat inflasi di daerah tersebut. Berdasarkan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, dapat dilihat bahwa inflasi di Kepri mengalami lonjakan yang cukup besar setelah adanya kenaikan harga BBM pada tahun-tahun terakhir. Sebelum kenaikan harga BBM, inflasi di Kepri tercatat cukup stabil, dengan rata-rata inflasi tahunan sekitar 2-3%. Namun, setelah kenaikan harga BBM, inflasi tahunan di Kepri meningkat signifikan, mencapai angka 4-6% dalam beberapa bulan setelah kenaikan harga tersebut.

Peningkatan harga BBM langsung mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian Kepri, yang sebagian besar bergantung pada distribusi barang dan jasa melalui jalur transportasi. Sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh kenaikan harga BBM adalah sektor pangan, transportasi, dan energi. Kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan biaya transportasi, baik untuk barang-barang kebutuhan pokok maupun barang lainnya. Hal ini mengakibatkan harga barang-barang di pasar juga ikut naik, yang berkontribusi pada inflasi. Misalnya, harga pangan seperti beras, minyak goreng, dan daging mengalami lonjakan harga yang signifikan, karena biaya distribusi yang semakin tinggi. Kenaikan harga BBM juga mempengaruhi biaya transportasi laut dan udara yang sangat penting bagi Kepri, mengingat posisi geografisnya sebagai provinsi yang terdiri dari banyak pulau.

Selain sektor pangan, sektor transportasi juga mengalami dampak besar akibat kenaikan harga BBM. Sebagian besar transportasi di Kepri, baik itu transportasi laut maupun darat, menggunakan BBM sebagai bahan bakar utama. Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya operasional transportasi meningkat, yang pada akhirnya mempengaruhi tarif angkutan barang dan penumpang. Kenaikan tarif transportasi ini, pada gilirannya, meningkatkan harga barang dan jasa lainnya, yang berkontribusi terhadap inflasi di daerah tersebut. Beberapa jenis barang, seperti bahan bangunan, pakaian, dan alat elektronik, yang tergantung pada distribusi luar daerah, juga mengalami kenaikan harga akibat peningkatan biaya transportasi.

Sektor energi juga terpengaruh oleh kenaikan harga BBM, karena harga bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik di Kepri juga mengalami peningkatan. Meskipun sebagian besar pasokan energi di Kepri berasal dari sumber daya alam lokal, namun pembangkit listrik yang menggunakan BBM tetap menjadi salah satu sumber utama energi di daerah ini. Peningkatan harga BBM menyebabkan biaya produksi listrik naik, yang kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan tarif listrik. Hal ini menyebabkan inflasi lebih lanjut, karena biaya energi yang lebih tinggi meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang mengandalkan energi untuk kegiatan rumah tangga dan industri.

Selain dampak langsung terhadap sektor-sektor tersebut, kenaikan harga BBM juga menambah ketidakpastian ekonomi di Kepri. Masyarakat yang sebelumnya sudah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, kini semakin tertekan dengan tingginya harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah sangat merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini, karena pendapatan mereka tidak meningkat secara signifikan, sementara harga barang-barang kebutuhan pokok semakin tinggi. Hal ini berisiko menurunkan daya beli masyarakat, yang kemudian berpengaruh pada konsumsi barang dan jasa.

Pemerintah daerah Kepri, dalam upaya mengendalikan inflasi, telah melakukan beberapa langkah seperti pengawasan ketat terhadap distribusi barang dan pemberian subsidi kepada sektor-sektor yang terdampak. Namun, meskipun langkah-langkah ini membantu sedikit meringankan beban masyarakat, efek jangka panjang dari kenaikan harga BBM tetap terasa. Pemerintah pusat juga berusaha untuk menstabilkan harga BBM melalui kebijakan subsidi, namun kebijakan tersebut seringkali tidak dapat sepenuhnya menanggulangi lonjakan harga yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dunia. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah inflasi lebih lanjut memerlukan kebijakan yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi di Kepri sangat signifikan. Inflasi yang tinggi menyebabkan peningkatan biaya hidup yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama kelompok dengan pendapatan rendah dan menengah. Beberapa sektor seperti pangan, transportasi, dan energi sangat terpengaruh oleh kenaikan harga BBM, yang memperburuk keadaan ekonomi di daerah ini. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih efektif untuk menanggulangi inflasi, baik melalui pengendalian harga BBM, penguatan kebijakan subsidi, serta pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor-sektor yang terpengaruh.

Dampak inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Selain kebijakan pengendalian inflasi, penting juga untuk mendorong diversifikasi ekonomi Kepri agar ketergantungan terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga energi dapat dikurangi. Diversifikasi ini dapat mencakup pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri lainnya yang tidak terlalu bergantung pada energi fosil, sehingga perekonomian daerah dapat lebih tahan terhadap guncangan harga energi. Dengan pendekatan yang lebih holistik, Kepri dapat mengurangi dampak negatif dari inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM, serta menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Daya Beli Masyarakat

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Sebelum kenaikan harga BBM, masyarakat di Kepri masih memiliki daya beli yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan pokok maupun non-pokok. Namun, setelah terjadinya kenaikan harga BBM, terjadi perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga BBM mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari harga barang kebutuhan pokok hingga biaya transportasi, yang menjadi semakin mahal. Hal ini memaksa masyarakat untuk mengalokasikan pengeluaran mereka secara lebih terbatas.

Salah satu perubahan yang paling mencolok setelah kenaikan harga BBM adalah pengurangan pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok. Sebelum kenaikan harga BBM, masyarakat masih mampu mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan non-pokok, seperti hiburan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Namun, setelah kenaikan harga BBM, banyak keluarga yang terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok tersebut. Pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk membeli barang-barang elektronik, pakaian, atau untuk bepergian, kini lebih banyak dialihkan untuk membeli barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, air, dan energi. Masyarakat yang sebelumnya menghabiskan dana untuk rekreasi, misalnya, kini lebih cenderung menahan diri dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Selain itu, kenaikan harga BBM juga menyebabkan peningkatan biaya transportasi, yang turut memengaruhi daya beli masyarakat. Transportasi adalah sektor yang sangat penting di Kepri, yang terdiri dari berbagai pulau, di mana hampir semua barang dan jasa harus didistribusikan menggunakan transportasi laut dan udara. Ketika harga BBM naik, tarif transportasi ikut meningkat, yang menyebabkan biaya hidup secara keseluruhan meningkat. Masyarakat yang mengandalkan transportasi untuk beraktivitas, baik untuk bekerja, bersekolah, atau berbelanja, merasa terbebani oleh biaya transportasi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, mereka terpaksa menurunkan pengeluaran untuk barang-barang yang tidak esensial dan lebih mengutamakan pembelian barang yang sangat dibutuhkan.

Kenaikan harga BBM juga memengaruhi sektor perumahan, yang tidak hanya berhubungan dengan biaya pembelian rumah atau sewa, tetapi juga dengan biaya energi yang digunakan untuk rumah tangga. Kenaikan harga BBM yang berimbas pada harga energi, seperti listrik dan gas, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan energi meningkat.

Banyak keluarga yang terpaksa mengurangi konsumsi energi, misalnya dengan menggunakan listrik lebih hemat atau mengurangi penggunaan peralatan rumah tangga yang boros energi. Beberapa rumah tangga bahkan terpaksa mengurangi penerangan atau pembelian barang-barang yang memerlukan konsumsi energi tinggi, seperti AC atau pemanas air, untuk mengurangi tagihan bulanan mereka.

Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap penurunan daya beli akibat kenaikan harga BBM adalah mereka yang berpenghasilan rendah atau menengah. Masyarakat dengan pendapatan tetap, seperti pekerja sektor informal atau buruh, paling merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Bagi mereka, kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi dapat sangat mengganggu kesejahteraan ekonomi, karena pendapatan mereka tidak dapat mengikuti kenaikan harga barang dan jasa. Bagi keluarga berpendapatan rendah, peningkatan harga barang-barang kebutuhan pokok dan transportasi berarti mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, kelompok masyarakat ini sangat rentan terhadap penurunan daya beli, yang berdampak pada kualitas hidup mereka.

Masyarakat yang berpendapatan menengah juga mengalami kesulitan akibat kenaikan harga BBM, meskipun mereka memiliki pendapatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah. Kelompok ini sering kali terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok dan merubah pola konsumsi mereka. Misalnya, mereka lebih memilih untuk mengurangi frekuensi makan di luar atau bepergian, serta memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan anak dan kesehatan. Meskipun mereka masih mampu membeli barang kebutuhan pokok, daya beli mereka untuk barang non-pokok sangat berkurang.

Di sisi lain, kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi relatif tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga BBM, karena mereka memiliki daya beli yang lebih besar. Meskipun mereka tetap merasakan peningkatan biaya hidup akibat inflasi, namun pengaruhnya terhadap konsumsi mereka tidak sebesar yang dialami oleh kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Kelompok ini masih dapat mempertahankan gaya hidup mereka dan mengalokasikan anggaran untuk barang-barang non-pokok, meskipun ada penyesuaian pada jenis dan jumlah barang yang dikonsumsi. Oleh karena itu, dampak dari kenaikan harga BBM lebih terasa pada kelompok-kelompok dengan pendapatan rendah hingga menengah.

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat dengan memberikan berbagai bentuk bantuan sosial, seperti

subsidi dan bantuan langsung tunai. Namun, meskipun bantuan sosial dapat membantu meredakan beban sebagian masyarakat, kebijakan ini tidak selalu mencakup seluruh lapisan masyarakat yang terdampak. Terlebih lagi, peningkatan harga BBM yang terus-menerus dapat mengurangi efektivitas kebijakan bantuan sosial dalam jangka panjang, karena harga barang dan jasa terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak jangka panjang dari kenaikan harga BBM, diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan daya saing ekonomi, diversifikasi sumber daya, dan pengelolaan energi yang lebih efisien.

Dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat di Kepri sangat besar, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan menengah. Pengurangan pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok dan penurunan kualitas hidup menjadi salah satu dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap perubahan harga energi. Kebijakan yang mampu menstabilkan harga BBM dan menjaga daya beli masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Dampak Kenaikan BBM

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang signifikan telah memberi dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Mengingat potensi dampak negatif tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah program bantuan sosial dan subsidi transportasi, yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung oleh peningkatan biaya hidup. Program bantuan sosial ini dirancang untuk membantu keluarga-keluarga berpenghasilan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, energi, dan transportasi.

Program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan. Meskipun program ini memberikan sedikit keringanan, efektivitasnya sangat bergantung pada distribusi yang tepat sasaran dan jumlah bantuan yang memadai untuk mencakup seluruh keluarga yang membutuhkan. Selain itu, subsidi transportasi yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat menurunkan tarif angkutan umum dan transportasi barang, yang semakin mahal akibat kenaikan harga BBM. Dengan subsidi ini, masyarakat dapat tetap mengakses layanan transportasi dengan harga yang

lebih terjangkau, sehingga mengurangi dampak inflasi terhadap daya beli mereka.

Selain bantuan sosial dan subsidi transportasi, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasar. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui operasi pasar dan pasar murah, yang bertujuan untuk mengontrol harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan sayuran. Operasi pasar ini dilakukan secara berkala di berbagai daerah, termasuk di Kepri, untuk memastikan bahwa harga barang pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. Pasar murah ini memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan rendah, untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar yang biasa.

Selain itu, operasi pasar juga memberikan dampak positif terhadap kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok. Melalui pasar murah, pemerintah dapat menekan inflasi yang disebabkan oleh lonjakan harga BBM dan biaya distribusi yang meningkat. Dengan adanya intervensi harga ini, diharapkan harga bahan pokok tetap dapat dijangkau oleh masyarakat luas, terutama yang berpendapatan rendah, tanpa mempengaruhi daya beli mereka secara signifikan. Walaupun demikian, efektivitas operasi pasar dan pasar murah sangat tergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, serta keberlanjutan dari program ini untuk memastikan kestabilan harga yang lebih permanen.

Pengawasan distribusi BBM dan barang kebutuhan pokok juga menjadi prioritas penting bagi pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah dan aparat terkait bekerja sama untuk memastikan bahwa distribusi BBM sampai ke konsumen dengan harga yang sesuai dan tidak terjadi penyelewengan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengontrol distribusi BBM ke pengecer agar tidak ada praktik penimbunan atau penjualan dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pengawasan distribusi ini juga mencakup pemantauan terhadap kualitas dan kuantitas pasokan BBM yang ada, untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kekurangan pasokan BBM yang dapat memperburuk dampak kenaikan harga.

Selain pengawasan terhadap distribusi BBM, pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok juga menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah terus memantau dan mengawasi rantai distribusi barang-barang pokok agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kenaikan harga BBM untuk menaikkan harga barang secara tidak wajar. Pengecer dan distributor yang terbukti melakukan praktik kecurangan atau penyalahgunaan dalam pendistribusian barang akan dikenakan sanksi. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan

harga barang kebutuhan pokok tetap stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa adanya kenaikan harga yang tidak terkendali.

Pentingnya pengawasan distribusi juga terlihat dalam upaya untuk memastikan bahwa bahan pokok yang masuk ke pasar berasal dari sumber yang sah dan tidak ada penyimpangan harga yang terjadi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat keamanan dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pemantauan intensif di lapangan, mulai dari tingkat grosir hingga pengecer. Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi distribusi barang-barang pokok dengan melibatkan mereka dalam proses pelaporan jika ada indikasi pelanggaran atau penimbunan barang.

Selain itu, salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mengelola konsumsi secara bijak, khususnya dalam hal penggunaan energi dan bahan bakar. Dengan memberikan informasi yang tepat tentang cara menghemat energi dan memanfaatkan subsidi dengan baik, diharapkan masyarakat dapat mengurangi dampak kenaikan harga BBM dalam kehidupan sehari-hari. Kampanye penghematan energi yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi energi yang mahal, serta membantu masyarakat beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah.

Meskipun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, seperti program bantuan sosial, subsidi transportasi, operasi pasar, dan pengawasan distribusi BBM, memberikan dampak positif dalam mengurangi beban masyarakat, tantangan yang dihadapi sangat besar. Kenaikan harga BBM yang berkelanjutan membutuhkan penyesuaian kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan agar tidak berdampak terlalu besar terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang sudah ada dan mengembangkan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap fluktuasi harga energi di pasar global. Selain itu, pendekatan yang lebih terintegrasi antara kebijakan ekonomi, energi, dan sosial sangat penting untuk mencapai keberlanjutan perekonomian yang stabil dan berkeadilan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga kestabilan perekonomian, meskipun tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap dampak inflasi dan penurunan daya beli.

D. KESIMPULAN

Dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sangat signifikan, terutama dalam hal inflasi dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM telah menyebabkan lonjakan harga barang kebutuhan pokok, transportasi, dan energi, yang pada gilirannya memperburuk daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti memberikan bantuan sosial, subsidi transportasi, serta melakukan operasi pasar dan pasar murah, dampak dari kenaikan harga BBM tetap terasa di tingkat rumah tangga. Pengawasan distribusi BBM dan barang kebutuhan pokok juga sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan mencegah penyalahgunaan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang sudah ada dan memperkenalkan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap fluktuasi harga BBM. Salah satunya adalah dengan memperkuat program subsidi yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok agar tidak ada manipulasi harga. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber energi dan meningkatkan efisiensi energi di sektor-sektor yang rentan terhadap kenaikan harga BBM, seperti transportasi dan industri. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat dipertahankan, dan perekonomian Kepri dapat lebih tahan terhadap dampak negatif dari kenaikan harga BBM di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Sandy, B. C. ., Manongga, D. ., & Iriani, A. . (2021). ANALISIS SENTIMEN TERHADAP KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA MEDIA ONLINE. Seminar Nasional & Konferensi Ilmiah Sistem Informasi, Informatika & Komunikasi, 24–30. Retrieved from <https://publikasi.uyelindo.ac.id/index.php/semmau/article/view/56>
- Fitri Nurzana, & Novrianti Novrianti. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Pangan saat Mendekati Hari Raya Idul Fitri: Studi Kasus Kota Tanjung Pina. *JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN*, 3(1), 178–185. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i1.397>
- Alwandi, M. A., & Angraini, D. P. (2022). PERSISTENSI INFLASI DI SUMATERA DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH. *Media Edukasi Data Ilmiah Dan Analisis (MEDIAN)*, 5(02), 1–10. Diambil dari <https://bpsjambi.id/median/index.php/median/article/view/61>
- Leonard , L., Eric Lionel, Toni Ong, Nico Fernando, & Vikhri septama. (2022). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi pada DKI Jakarta. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(4), 172–180. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i4.420>
- Hariyanti, P., Iryani, N., & Ayu, P. (2023). Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Dan Pengaruhnya

- Terhadap Inflasi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 99-108.
<https://doi.org/10.36985/8sngq977>
- S. Sarbaini and N. Nazaruddin, "Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Laju Inflasi di Indonesia", *JTMIT*, vol. 2, no. 1, pp. 25-32, Mar. 2023. <http://jurnal-tmit.com/index.php/home/article/view/132/45>
- Elma Nurkhanifah, Syamsuddin, Syamsul Arifin, & Tamamudin. (2023). Analisis Dampak Menurunnya Daya Beli Di Lingkungan Masyarakat Indonesia Akibat Inflasi. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 240-248. Retrieved from <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/897>
- ARDIANSYAH, H. (2017). PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3).
<https://doi.org/10.26740/jupe.v5n3.p%p>
- Hernaningsih, F. (2018). PENGARUH KESTABILAN INFLASI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP DAYA BELI MASYARKAT. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, 8(2). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i2.236>
- Diana, A., Fitriyani, Purnawa Sari, Y. ., & Rizkina, A. . (2023). INFLASI KOMODITAS ADMINISTERED PRICE DAN DAYA BELI MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PROVINSI ACEH. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 82-91. Retrieved from <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/78>